

Sosialisasi Strategi Pengembangan Perpustakaan sebagai Pusat Kebudayaan Sekolah

Randa Anggarista^{*1}, Anggun Sindiana², Desya Eka Aninda³, Yulia Haerunnisa⁴, Tika Aini⁵

^{1,2,3,4}Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu

^{*}e-mail: randaanggarista@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Oktober 16, 2025

Revised: Oktober 24, 2025

Published: Oktober 28, 2025

Kata kunci

Advokasi; pelibatan masyarakat;
peningkatan layanan; perpustakaan;
TPBIS.

ABSTRAK

Perpustakaan merupakan salah satu aspek penunjang kegiatan pembelajaran di luar kelas bagi siswa. Namun seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi, perpustakaan tidak lagi memiliki peran yang strategis di lingkungan sekolah. Hal itu disebabkan oleh minimnya inovasi sekolah dan dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian mencoba memberikan sosialisasi dan rekomendasi kepada sekolah mengenai strategi pengembangan perpustakaan sekolah jenjang menengah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMPN 2 Batukliang Utara pada Sabtu, 11 Oktober 2025 dengan peserta yang terdiri dari guru, lima belas siswa, dan anggota Forum Mahasiswa Desa Karang Sidemen. Fokus utama kegiatan sosialisasi terletak pada strategi untuk mengembangkan perpustakaan sekolah, serta menumbuhkembangkan animo warga sekolah untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan kebudayaan sekolah. Alur kegiatan pengabdian diawali dengan pembukaan, penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi. Upaya strategis yang dapat diimplementasikan sekolah untuk meningkatkan animo peserta didik guna memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar, termuat dalam program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan tiga strategi utama yaitu *peningkatan layanan informasi*, *pelibatan masyarakat*, dan *advokasi*. Tiga strategi tersebut dapat diperkuat oleh upaya publikasi dan promosi yang menunjang tercapainya program perpustakaan. Melalui kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian berharap sekolah akan terus berupaya untuk mengembangkan perpustakaan dan menumbuhkembangkan kualitas sumber daya manusia (peserta didik) melalui kegiatan inovatif yang diselenggarakan di perpustakaan sekolah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0



Corresponding Author:

Randa Anggarista, Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, Indonesia

Email: randaanggarista@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Perpustakaan sekolah merupakan aspek penunjang tercapainya indikator pembelajaran dalam satuan pendidikan. Melalui sarana yang disediakan, perpustakaan harus mampu membangkitkan dan meningkatkan animo warga sekolah untuk memanfaatkan perpustakaan. Hal demikian telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 BAB I Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, cetak, rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.” Perpustakaan sekolah dalam peraturan tersebut termasuk pada perpustakaan khusus yang dikelola oleh lembaga pendidikan dan diperuntukan bagi pemustaka jenjang sekolah.

Namun sejauh ini, perpustakaan tidak lagi menjadi sarana strategis di lingkungan sekolah. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya inovasi sekolah dalam mengembangkan gedung maupun layanan perpustakaan yang bersumber dari minimnya dukungan dari pemerintah daerah melalui peraturan daerah dan sejenisnya. Kondisi tersebut juga terjadi di SMPN 2 Batukliang Utara yakni sebuah sekolah yang terletak di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Padahal dalam undang-undang telah dicetuskan bahwa perpustakaan merupakan prasarana wajib yang harus diselenggarakan, lengkap dengan sarana dan kegiatan penunjangnya. Hal itu termuat dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah Pasal 1 Ayat 11 yang menyebutkan bahwa “Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang memiliki peran integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.”

Kondisi tersebut membuat tim pengabdian memutuskan diri untuk melakukan pengabdian di SMPN 2 Batukliang Utara. Melalui kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian mencoba memberikan rekomendasi mengenai strategi pengelolaan perpustakaan sekolah yang bersumber dari salah satu program prioritas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yakni TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial). Pengabdian ini memberikan paparan mengenai pola dan model pengembangan maupun praktik baik perpustakaan dengan strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tersebut.

2. METODE

Kegiatan pengabdian berlangsung di SMPN 2 Batukliang Utara pada Sabtu, 11 Oktober 2025, mulai pukul 08.00—10.30 WITA. Peserta yang terlibat dalam kegiatan terdiri dari guru, lima belas siswa, serta anggota Forum Mahasiswa Desa Karang Sidemen. Kegiatan pengabdian ini fokus pada upaya strategis untuk mengembangkan perpustakaan dan menumbuhkembangkan animo warga sekolah untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kebudayaan sekolah. Kegiatan pengabdian dimulai dari pembukaan, paparan materi oleh narasumber, tanya jawab dan evaluasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan rendahnya animo warga sekolah untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar di luar kelas, terutama di SMPN 2 Batukliang Utara, menjadi perhatian utama tim pengabdian dalam dunia pendidikan. Selain kuantitas bahan bacaan yang belum memadai, hal demikian tidak lepas dari minimnya kegiatan representatif dan inovatif yang diselenggarakan sekolah maupun pengelola perpustakaan. Perpustakaan harus terus berkembang sebagai salah satu pusat informasi, sumber pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai jasa lainnya (Endarti, Sri., 2022: 23). Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian mencoba memberikan rekomendasi tentang model pengelolaan perpustakaan yang dapat diterapkan dan dikembangkan di perpustakaan sekolah melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) kepada pihak SMPN 2 Batukliang Utara.

a. Konsep TPBIS

TPBIS atau Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan sebuah program prioritas Perpustakaan Nasional yang mengubah konsep dan model perpustakaan (bertransformasi). Perpustakaan yang awalnya hanya menjadi ruang untuk membaca dan menulis diubah sebagai pusat kegiatan masyarakat, terutama peserta didik di sekolah. Hal ini tidak lepas dari perubahan zaman dan pola hidup masyarakat, menyebabkan perpustakaan harus dapat menyesuaikan diri. Melalui Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial BAB I Pasal 1 disebutkan bahwa “TPBIS merupakan upaya peningkatan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan.” Anggarista dan Farida (2024:164) menjelaskan bahwa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bersumber dari kata *transformer* yang berarti perubahan atau berubah, serta inklusi sosial yang berarti perpustakaan berbasis kebutuhan maupun kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, TPBIS mencoba memperkuat perannya di tengah masyarakat dengan peningkatan kualitas layanan, baik melalui sarana, kegiatan, sumber daya manusia, hingga daya dukung eksternal. Melalui TPBIS, pemerintah—dalam hal ini Perpustakaan Nasional, mencoba memberikan kebijakan dan strategi baru mengenai perpustakaan konvensional menuju perpustakaan yang modern dan lebih berdaya guna. Adapun sifat inklusif dalam TPBIS tersebut diwujudkan dengan adanya berbagai kegiatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat—sekolah, tanpa membedakan setiap agama, ras, suku, dan lain-lain. Sifat inklusif tersebut

memungkinkan masyarakat—warga sekolah, memperoleh perlakuan yang sama pada saat memanfaatkan perpustakaan. Salah satu *goal* (tujuan) program TPBIS adalah menyejahterakan masyarakat—warga sekolah, baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya, dan lain-lain.

Salah satu contoh praktik baik yang direkomendasikan tim pengabdian adalah mengintervensi pihak sekolah untuk memberikan pelatihan mendongeng kepada peserta didik yang akan ikut berkontestasi pada lomba mendongeng tingkat kabupaten. Intervensi tersebut dilakukan melalui lobi dan menjalin kemitraan dengan pihak sekolah agar pengelola perpustakaan dilibatkan pada saat mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti lomba yang dimaksud. Hal ini sebagai salah satu contoh nyata bahwa program TPBIS telah diwujudkan melalui transformasi perpustakaan pada ranah pendidikan.



Gambar 1. Paparan Materi tentang Konsep TPBIS

a. Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

1) Peningkatan Layanan Informasi

Strategi pertama dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) adalah peningkatan layanan informasi. Strategi pertama ini berhubungan dengan upaya strategis yang dapat dilakukan pengelola perpustakaan maupun pihak sekolah untuk mendesain kondisi perpustakaan sedemikian rupa, sehingga menambah daya tarik pengunjung (pemustaka), terutama siswa. Peningkatan layanan informasi dapat dilakukan dengan menambah jumlah koleksi—buku di perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengelola perpustakaan dapat melakukan survei dengan menyebar angket untuk mengetahui kebutuhan buku kepada peserta didik. Hal ini bertujuan agar setiap koleksi berdaya guna dan dapat bermanfaat bagi siswa.

Peningkatan layanan informasi tidak hanya terbatas pada bertambahnya jumlah koleksi, tetapi dapat juga berupa pengadaan sarana penunjang perpustakaan, seperti televisi digital, komputer, akses *wifi* terbuka bagi seluruh pemustaka maupun sarana penunjang lainnya. Perkembangan zaman saat ini menyebabkan perpustakaan harus dapat bertransformasi. Perpustakaan tidak hanya menyediakan bacaan cetak, tetapi juga berupa bahan bacaan digital yang dapat diakses melalui piranti teknologi yang disediakan di sekolah, sehingga memberikan kesan bahwa layanan perpustakaan sekolah begitu efektif, fleksibel dan memiliki daya aksesibilitas yang memadai. Selain itu, pengelola perpustakaan juga dapat mendesain interior ruangan, seperti pembuatan poster yang representatif, mengatur tata letak kursi, meja, maupun sarana penunjang lain yang membuat pemustaka menjadi nyaman berada di perpustakaan.

Rekomendasi yang diberikan tim pengabdian dalam strategi pertama ini antara lain, pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan sekolah melalui pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan kegiatan sejenis yang dapat menunjang pengetahuan tentang pengelolaan perpustakaan. Hal itu dapat dilakukan melalui jalinan kerja sama dengan perpustakaan desa atau kelurahan, perpustakaan daerah di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. Selain itu, perpustakaan sekolah perlu menyediakan bahan bacaan bermutu—bermanfaat, berdaya guna, serta sesuai kebutuhan pemustaka (siswa); menyediakan layanan dan akses digital yang memadai—internet, buku digital, pojok baca; kemudian membuat poster literasi yang menunjang animo warga sekolah untuk memanfaatkan perpustakaan; serta layanan lainnya.



Gambar 2. Rekomendasi Peningkatan Jumlah Buku Perpustakaan oleh Narasumber

2) Pelibatan Masyarakat

Strategi kedua yang bisa diterapkan pihak sekolah adalah pelibatan masyarakat. Setiap layanan yang telah disediakan tidak akan memberikan manfaat yang optimal, apabila tidak didukung oleh hadirnya warga sekolah ke perpustakaan. Oleh sebab itu, pengelola perpustakaan perlu menyelenggarakan kegiatan yang memiliki daya tarik bagi warga sekolah. Maka, perlu adanya survei berkelanjutan seperti yang telah dilakukan pada strategi pertama. Survei ini juga bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dibutuhkan siswa. Pelibatan masyarakat ini lebih kepada usaha sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan yang inovatif, beragam, representatif, serta dilakukan secara berkala maupun berkelanjutan.

Beberapa kegiatan pelibatan warga sekolah yang dapat dilakukan antara lain menyelenggarakan festival literasi sekolah berupa lomba pidato, puisi, dongeng, atau kegiatan lain yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelibatan masyarakat ini tidak hanya fokus kepada aktivitas literasi dasar seperti membaca dan menulis, tetapi kegiatan lain yang menunjang animo peserta didik untuk memanfaatkan perpustakaan. Misalnya, perpustakaan sekolah menyelenggarakan program senam sehat, permainan tradisional pada Sabtu Budaya, dan lain-lain. Intinya, strategi ini bertujuan agar kegiatan di perpustakaan lebih beragam, bervariasi, serta mendekatkan perpustakaan kepada peserta didik.

Adapun rekomendasi jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai implementasi strategi pelibatan warga sekolah antara lain kelas komputer intensif; kelas bahasa asing intensif; penyelenggaraan festival literasi yang dirangkai dengan lomba literasi, seperti mengulas buku, sosialisasi literasi, *workshop* penulisan cerita pendek dan sejenis; maupun kegiatan lain yang representatif dan sesuai kebutuhan sekolah. Dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut, sekolah maupun pengelola perpustakaan sekolah perlu bersinergi dengan sumber daya yang potensial. Misalnya, pengelola sanggar atau komunitas baca, sastrawan dan seniman, maupun sumber daya manusia lainnya yang akan menunjang keberhasilan program.

3) Advokasi

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) menekankan pada adanya kolaborasi atau sinergi antarlini. Berbagai kegiatan yang telah dirancang pada dua strategi sebelumnya, dipastikan tidak akan dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Maka, pengelola perpustakaan maupun pihak sekolah perlu melakukan advokasi atau mencari perlindungan kepada pihak lain. Upaya advokasi ini juga bertujuan untuk mencari dan memperoleh dukungan agar setiap rencana kegiatan berjalan optimal. Upaya advokasi dapat dilakukan dengan pemerintah, pihak swasta, relawan, komunitas literasi, perpustakaan desa, perpustakaan daerah (kabupaten/kota maupun provinsi), balai bahasa, dan pihak potensial lainnya. Misalnya, jika perpustakaan sekolah akan menyelenggarakan pelatihan menulis cerita pendek, maka pengelola perpustakaan dapat menjalin komunikasi dengan para penggiat komunitas literasi terdekat atau kepada balai bahasa setempat untuk pengadaan narasumber. Contoh berikutnya, pada saat perpustakaan menyelenggarakan lomba memasak, maka pengelola dapat menjalin kerjasama dengan BPOM untuk pengadaan dewan juri.

Advokasi dalam TPBIS dilakukan dengan lobi dan kemitraan. Lobi yakni upaya yang dilakukan kepada kelompok maupun perorangan agar mendukung kegiatan yang telah direncanakan, baik melalui keputusan maupun peraturan. Misalnya, dana BOS tidak dapat dialokasikan kepada pengembangan perpustakaan, maka pihak sekolah dapat melakukan lobi kepada pemerintah daerah agar menyusun peraturan daerah tentang penggunaan dana untuk pengadaan dan pengembangan kegiatan perpustakaan sekolah. Adapun kemitraan yakni kegiatan kerjasama antara dua pihak karena memiliki tujuan yang sama. Misalnya,

perpustakaan sekolah memiliki kegiatan pelatihan bahasa jawa untuk mengasah kemahiran peserta didik tentang bahasa daerah, maka pengelola perpustakaan maupun pihak sekolah dapat menjalin kemitraan dengan balai bahasa setempat.

Tiga strategi dalam TPBIS perlu dioptimalkan dengan kegiatan publikasi dan promosi yakni upaya memperkenalkan kepada khalayak publik mengenai perpustakaan, kegiatan, maupun hal lainnya yang berkaitan dengan perpustakaan. Selain itu, publikasi dan promosi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kuantitas pemustaka dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai pusat belajar. Bahkan publikasi juga akan menjadi salah satu kunci untuk menunjang keberhasilan kegiatan advokasi. Contoh, pada saat melakukan lobi, pengelola perpustakaan dapat menunjukkan informasi lengkap mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Publikasi dapat dilakukan dengan berbagai media, mulai dari media cetak, seperti koran, majalah, poster sekolah; maupun media online, seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, dan media sejenis.

Rekomendasi yang diberikan tim pengabdian pada strategi advokasi antara lain, sekolah perlu menjalin kerja sama dengan sumber daya yang berasal dari akar rumput, seperti pengelola sanggar, taman bacaan, hingga filantropi yang meliputi pemerintah daerah—dalam hal ini dinas perpustakaan dan kearsipan maupun balai bahasa setempat, serta lembaga pemerintah lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Adapun rekomendasi pada bidang publikasi antara lain, sekolah perlu mengupayakan penyelenggaraan dan pengoptimalan *website* sekolah atau media sosial sekolah sejenisnya untuk mempublikasikan dan mempromosikan layanan perpustakaan. *Website* sekolah dapat menjadi fasilitas penunjang promosi kegiatan maupun sarana publikasi karya-karya siswa. Misalnya, peserta didik dapat mempublikasikan karya maupun produknya melalui *website* sekolah. Upaya ini bersifat sederhana, tetapi akan berdaya guna jika dilakukan secara berkelanjutan.

3 KESIMPULAN

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan konsep pengelolaan perpustakaan sebagai pusat kegiatan warga sekolah. Perpustakaan mencoba mendekatkan diri dengan warga sekolah. Dengan berbagai daya dukung, sekolah dan pengelola perpustakaan sekolah harus mampu menghadirkan berbagai layanan dan kegiatan yang dibutuhkan warga sekolah. Selain itu, pengelola perpustakaan sekolah juga harus dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengimplementasikan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Dalam TPBIS, sekolah dan pengelola perpustakaan, dapat memanfaatkan sumber eksternal untuk membangun kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan kegiatan. Perpustakaan sekolah punya potensi untuk berkembang dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik dan warga sekolah lainnya melalui tiga strategi TPBIS yakni peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat dan advokasi. Setiap kegiatan yang telah dilakukan, akan terlaksana secara optimal jika dirangkai dengan publikasi melalui media *online*, cetak maupun lainnya.

REFERENSI

- [1] Anggarista, Randa dan Farida Jaeka. 2024. Pengembangan Perpustakaan Lumbung Literasi Desa Karang Sidemen melalui Program TPBIS. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SENADIBA IV)*.
- [2] Endarti, Sri. 2022. Perpustakaan sebagai Tempat Rekreasi Informasi. *Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, 2 (1), 23—38.
- [3] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*.
- [4] Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024*.
- [5] Presiden Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*.
- [6] Presiden Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*.
- [7] Putra, Sandi Justitia., et al. 2025. Penyelenggaraan Gerakan Kaum Lombok Utara Cinta Literasi Tahun 2024 Melalui Kegiatan Sarasehan dan Workshop Pengelolaan Komunitas Penggerak Literasi di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Abhinaya (JPA)*, 1 (1), 1—7.